

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT HUMAS PEMERINTAH PROPINSI RIAU DALAM KOMUNIKASI BENCANA

Adhianty Nurjanah, Aswad Ishak, Sakir

Program Studi Ilmu Komunikasi Program Studi Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

No. Telp./HP: 081329648069, 08156871870, 081392529488

E-mail: adhianty@umy.ac.id, ishak@umy.ac.id, mas.sakir@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

Dalam komunikasi bencana pemerintah perlu menjalankan kegiatan komunikasi dengan tepat. Penerapan E-government menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan. Pemanfaatan media komunikasi berbasis internet oleh pemerintah pada umumnya masih terbatas. Artikel ini ingin melihat bagaimana penerapan media komunikasi berbasis internet dalam mengkomunikasikan bencana kabut asap di Propinsi Riau. Konsep teori yang digunakan adalah e-government, humas pemerintah dan komunikasi bencana. Ketiga konsep ini dipandang sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Data diperoleh melalui wawancara, focus group discussion. Hasil temuan yang diperoleh menunjukkan dalam komunikasi bencana kabut asap Pemerintah Propinsi Riau telah menerapkan e-government.

Kata kunci: e-government, humas pemerintah, komunikasi bencana

ABSTRACT

In disaster communication the government needs to carry out communication activities appropriately. The implementation of E-government is a must to do. The use of internet-based communication media by the government in general is still limited. This article wants to see how the application of internet-based communication media in communicating smog disasters in Riau Province. The theoretical concept used is e-government, government public relations and disaster communication. These three concepts are considered in accordance with the problems at hand. Data obtained through interviews, focus group discussion. The findings obtained indicate that in the smog disaster communication the Riau Provincial Government has been implementing e-government.

Keywords: e-government, government public relations, disaster communication

Pendahuluan

Wilayah Indonesia merupakan daerah rawan terhadap bencana. Berbagai macam jenis bencana terjadi di Indonesia, baik dalam skala kecil yang tidak membawa pada kerugian sampai dengan skala besar yang menimbulkan dampak dan kerugian materiil dan immateriil yang besar. Peristiwa bencana yang terjadi pada umumnya memiliki efek atau dampak negative bagi kehidupan masyarakat di daerah terdampak. Persoalan penting yang dialami pada saat terjadinya bencana alam adalah persoalan komunikasi. Penyampaian informasi terkait dengan bencana alam yang terjadi menjadi salah satu kunci penting dalam penanganan kebencanaan.

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki rawan bencana adalah Propinsi Riau. Daerah ini memiliki wilayah dengan lahan gambut seluas 55% dari total luas daerah (wawancara kepala BPBD Propinsi Riau). Lahan gambut ini memiliki potensi tinggi terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ketika bencana alam terjadi, komunikasi bencana yang efektif yang melibatkan teknologi komunikasi dan informasi harus dilakukan khususnya dari pihak pemerintah kepada masyarakat daerah terdampak bencana. Dalam hal ini persoalan prioritas yang harus dilakukan terkait KIKK yakni Komunikasi, Informasi,

Koordinasi dan Kerjasama. Hal ini mutlak dibutuhkan karena dibutuhkan pembaharuan informasi yang cepat, tepat, dan akurat (Budi, 2011:364). Kebutuhan informasi mengenai lokasi korban, jumlah korban dan pendataan kebutuhan korban amat dibutuhkan untuk mempermudah petugas dan relawan saat membantu para korban (Mahdia dan Noviyanto, 2013: 163) karena di lapangan dengan kondisi panik, cemas dan ketakutan maka rentan terjadi kesimpangsiuran informasi dan pembagian bantuan logistik yang tidak merata yang menyebabkan penanggulangan bencana menjadi lambat. Persoalan KIKK ini juga penting dilakukan bukan hanya dalam hal memberikan informasi yang akurat seputar bencana, tetapi juga dapat membangun empati publik serta mendorong masyarakat yang tertimpa bencana untuk dapat bangkit dari permasalahan yang timbul akibat bencana alam yang terjadi.

Dalam hal ini diperlukan manajemen bencana yang komprehensif. Adapun proses manajemen bencana modern menurut Coppola dan Maloney (2009: 53–55) terdiri dari 4 aspek yakni *mitigation*, *preparedness*, *response*, dan *recovery* yang idealnya dilakukan secara sinergis oleh setiap *stakeholder* terutama pihak pemerintah dengan mengoptimalkan alat komunikasi yang ada. Komunikasi

bencana yang efektif melibatkan teknologi komunikasi dan informasi dengan teknologi internet mempermudah penanganan bencana alam terhadap daerah terdampak. Pada saat ini, perkembangan teknologi telah memudahkan publik untuk mengakses informasi penting mengenai bencana yang akan menyokong efisiensi manajemen bencana (Asteria, 2016: 2). Salah satu contoh yakni adanya pemanfaatan aplikasi *Google API* yakni sebuah sistem informasi manajemen bantuan logistik yang akan memberikan jarak, rute jalan, dan lokasi posko bencana alam sehingga bantuan bisa diberikan lebih tepat sasaran.

Landasan Konsep/Teori

E-Government memiliki banyak pengertian. Secara umum terminology E-Government dapat didefinisikan sebagai penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. Menurut Raharwindy (2014) bahwa *traditional government*, menuntut adanya transformasi birokrasi pemerintahan dengan mengembangkan E-Government. Dengan demikian penerapan E-government dimaksudkan untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan akurat dari lembaga pemerintahan kepada

segenap para pemangku kepentingan yang ada

Dengan diterapkannya E-Government diharapkan dapat memberikan perubahan berupa perbaikan pelayanan kepada masyarakat luas. Adapun tujuan dan manfaat dari E-Government ialah penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dengan lebih efektif. Umumnya semakin banyak layanan online yang tersedia dan semakin luas penggunaan layanan tersebut, maka akan semakin besar dampaknya terhadap E-Government. Manfaat E-Government menurut Al Gore dan Tony Blair dalam Indrajit (2002 : 5) yaitu:

1. Memperbaiki kinerja suatu pelayanan pemerintah kepada stakeholdernya.
2. Meningkatkan transparansi, control dan akuntabilitas.
3. Mengurangi biaya administrasi, relasi dan intraksi.
4. Memberikan peluang untuk mendapatkan sumber-sumber penghasilan baru.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat up to date.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain yang ikut andil dalam pembuatan kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Selain itu ahli lain memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan E-Government. Menurut Andriariza, Yan (2014) terdapat 5 faktor kesuksesan dalam penerapan e-government, yaitu Hukum dan Peraturan, Struktur Organisasi, Proses Bisnis, Teknologi Informasi dan Visi, Objektif dan Strategi

Menurut Indrajit (2002 : 11-13) visi E-Government yang baik akan berlandaskan pada 4 prinsip, yaitu sebagai berikut:

- 1) Fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- 2) Membangun lingkungan yang kompetitif.
- 3) Memberikan penghargaan terhadap inovasi dan memberikan ruang kesempatan bagi kesalahan.
- 4) Tekankan pada pencapaian efisiensi.

Adapun jenis-jenis pelayanan E-Government menurut Indrajit (2006: 30-32) dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu:

- a) Publikasi, menurut Indrajit merupakan komunikasi satu melalui internet.
- b) Interaksi, menurut Indrajit adanya interaksi oleh pemerintah dengan mereka yang berkepentingan.
- c) Transaksi, menurut Indrajit merupakan interaksi dua arah yang didalamnya terdapat transaksi yang

berhubungan dengan uang dari satu pihak lainnya (tidak gratis).

Pelaksanaan E-Government dapat mengambil berbagai macam bentuk. Dalam menunjang pelaksanaan E-Government tersebut setiap instansi pemerintah harus melaksanakan fungsi komunikasi bagi stakeholder terkait. Salah satu instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat adalah bagian humas. Humas dapat dipahami sebagai suatu bentuk komunikasi yang berlaku terhadap semua jenis organisasi, baik yang bersifat komersial atau bertujuan mencari keuntungan (profit) maupun perusahaan non komersial yang tidak mencari keuntungan baik organisasi tersebut berada di sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Dengan demikian dapat dipahami humas merupakan salah satu usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan menguntungkan antara organisasi dengan publik dengan menumbuhkan saling pengertian antara organisasi dengan publiknya.

Humas Pemerintahan melakukan kegiatan *public relations* dengan tujuan untuk memberikan pelayanan baik mengenai informasi maupun menggalang partisipasi masyarakat untuk meyakinkan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan pihak pemerintahan dengan memegang

teguh prinsip keterbukaan. Masyarakat di era keterbukaan informasi berhak mendapatkan informasi yang benar dan tidak diskriminatif jadi humas harus melaksanakan tugasnya demi memberikan pelayanan optimal. Hal ini seperti yang disampaikan dalam Nurjanah dan Nurnisya (2016) bahwa Humas Pemerintah juga memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi kebijakan baru khususnya terkait tagline baru “jogja istimewa” kepada masyarakat di Jogjakarta dengan memanfaatkan digital public relations yang merupakan bagian dari penerapan E-government.

Dalam kaitan bagaimana humas pemerintah melaksanakan kegiatannya, Betty Wahyu Nilasari (2012:7) dalam bukunya Humas Pemerintah, secara garis besar tujuan Humas Pemerintah menyangkut tiga hal yaitu:

- a) Reputasi dan citra : tugas humas tidak lepas dari reputasi dan citra, ini artinya asumsi bahwa citra yang positif akan berkaitan dengan tingginya akses publik terhadap output dari organisasi tersebut.
- b) Jembatan komunikasi: humas menjadi komunikator dan mediator dalam penyampaian aspirasi kepemerintah.
- c) *Mutual benefit relationship* : humas harus menjamin bahwa pemerintah

berada dalam operasinya memiliki niat baik dalam mewujudkan tanggung jawab sosial dan diekspresikan melalui hubungan yang saling menguntungkan diantara pemerintah dan publik.

Sejalan dengan pendapat yang telah diuraikan sebelumnya Edward L Bernays dalam (Nilasari : 9) mejelaskan fungsi humas pemerintah yaitu:

- a) Memberikan penerangan kepada masyarakat
- b) Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung, dan
- c) Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagai seorang humas di bidang pemerintahan maka praltisi humas tersebut harus didukung dengan kemampuan sebagai berikut:

1. Mengamati dan menganalisis setiap persoalan yang menjadi kepentingan instansi dan stakeholdernya
2. Mampu menjalin komunikasi dua arah dengan setiap publiknya

3. Mampu mempengaruhi dan menciptakan opini publik yang mendukung program instansinya
4. Mampu membangun hubungan baik dan kerjasama yang kondusif dengan berbagai pihak.

Peranan humas pemerintah dipandang penting guna memberikan informasi yang jelas kepada setiap pihak yang terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Fungsi humas pemerintahan dapat dilaksanakan untuk berbagai situasi tak terkecuali saat menghadapi kebencanaan. Pada saat dan pasca bencana terjadi komunikasi menjadi hal penting yang harus dilakukan khususnya dari pihak pemerintah kepada masyarakat terdampak bencana. Dalam hal ini pada saat terjadi dan pasca bencana kebutuhan akan informasi yang akurat diperlukan oleh masyarakat maupun lembaga swasta yang memiliki kepedulian terhadap korban bencana. Komunikasi dalam bencana tidak saja dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana, tapi juga penting pada saat dan pra bencana. Sebagaimana dikatakan bahwa komunikasi adalah cara terbaik untuk kesuksesan mitigasi bencana, persiapan, respon, dan pemulihan situasi pada saat bencana. Kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan tentang bencana kepada publik, pemerintah, media

dan pemuka pendapat dapat mengurangi resiko, menyelamatkan kehidupan dan dampak dari bencana (Haddow, G. D, dan Kims 2008: xiv).

Menurut Haddow, G. D, dan Kims (2008:2) terdapat 5 landasan utama dalam membangun komunikasi bencana yang efektif yaitu:

- 1) *Customer Focus*, yaitu memahami informasi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam hal ini masyarakat dan relawan. Harus dibangun mekanisme komunikasi yang menjamin informasi yang disampaikan dengan tepat dan akurat.
- 2) *Leadership Commitment*, pemimpin yang berperan dalam tanggap darurat harus memiliki komitmen untuk melakukan komunikasi efektif dan terlibat aktif dalam proses komunikasi.
- 3) *Situational Awareness*, komunikasi efektif didasari oleh pengumpulan, analisis dan diseminasi informasi yang terkendali terkait bencana. Prinsip komunikasi efektif seperti transparansi dan dapat dipercaya menjadi kunci.
- 4) *Media partnership*, media seperti televisi, surat kabar, radio, dan lainnya adalah media yang sangat

penting untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada publik. Kerjasama dengan media menyangkut kesepahaman tentang kebutuhan akan informasi.

- 5) Penanggulangan Bencana, harus didukung dengan berbagai pendekatan baik soft power maupun hard power untuk mengurangi resiko dari bencana. Pendekatan soft power adalah dengan mempersiapkan kesiagaan masyarakat melalui sosialisasi dan pemberian informasi tentang bencana. Sementara hard power adalah upaya menghadapi bencana dengan pembangunan fisik seperti membangun sarana dan prasarana.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan objek penelitian adalah penerapan E-government Humas Pemerintah Propinsi Riau. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis, atau lisan orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2001: 103). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan dan menganalisa terhadap data yang ada berdasarkan pada

teori E-Government, Humas Pemerintah dan komunikasi bencana.

Penelitian ini lebih mengarah kepada paradigma positivistik karena paradigma ini berkenaan dengan pencarian atau penemuan hukum sebab-akibat yang dapat digunakan dalam konteks dan waktu yang berbeda (Daymon, 2002:11). Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi bagi para humas terutama humas di bidang pemerintahan untuk menerapkan E-Government yang efektif dalam komunikasi bencana.

Tehnik pengumpulan data menggunakan data primer yakni wawancara kepada informan terkait yang dipilih secara *purposive* demi memenuhi kebutuhan penelitian, sedangkan data sekunder yakni menggunakan teknik studi pustaka dan dokumentasi guna mengkonfirmasi dan memperkuat data untuk dianalisis. Analisis data yang bersifat kualitatif mengharuskan peneliti untuk melakukan aktivitas secara serempak dengan pengumpulan data, interpretasi data dan menulis laporan penelitian. (Creswell, 2012: 145). Dengan demikian analisis data tidak dilakukan secara terpisah dengan pengumpulan data, tetapi merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Selama pengumpulan data, peneliti bergerak secara interaktif dalam 3

komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan simpulan akhir/verifikasi (Sutopo, 2002: 186).

Pembahasan

Dalam menjalankan tugas melakukan komunikasi kebencanaan di Propinsi Riau tidak hanya dijalankan oleh bagian humas dan protocol. Kegiatan komunikasi ini dijalankan oleh Kantor Humas dan Protokol Propinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Riau. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan melakukan pemetaan wilayah bencana. Berdasarkan data wawancara dengan kepala BPBD Propinsi Riau, seluruh wilayah sejumlah 12 kabupaten/kota yang ada di Riau berpotensi mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sudah mengalami penurunan yang besar dibandingkan dengan periode terparah pada tahun 2015 yang menjadikan Riau sulit untuk diakses karena kabut asap yang tebal. Hal ini tak lepas dari peran kegiatan komunikasi yang dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau memberikan penjelasan ke masyarakat untuk tidak melakukan komunikasi dan sosialisasi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Edwar Sanger Kepala BPBD Propinsi dalam wawancara:

“Terkait tuduhan masyarakat yang sebetulnya korporasi sudah sering memberikan kontribusi, sebetulnya kami sudah sering melaluikan komunikasi dengan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kemudian masyarakat kalau ingin membuka lahan koordinasikan dulu dengan dinas terdekat, apalagi bisa di bimbing dan dibantu. Selalu disampaikan jangan membakar. Sudah melakukan selebaran leaflet, pamphlet, media yang digunakan juga sudah media sosial, media cetak, media televise, online semua sudah, komunitas masyarakat peduli api juga sudah ada yang berada di setiap desa binaan kita.”

Dengan demikian informasi mengenai pentingnya menjaga perilaku yang tidak berpotensi menyebabkan kejadian kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui semua lini media. Hal lain yang dilakuan adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemadaman yang terjadi. Masyarakat Peduli Api (MPA) merupakan kelompok sosial di masyarakat yang dibentuk untuk tanggap terhadap bencana.

Secara terpisah pada saat dilakukan FGD dengan masyarakat di Kabupaten Siak menyatakan bahwa peran masyarakat peduli api sangat besar terhadap

penanganan mulai dari saat pencegahan hingga apabila terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi. Masyarakat peduli api melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran warga mengenai bahaya kebakaran yang dapat terjadi. Dengan demikian masyarakat dapat menghindari hal-hal yang dapat menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

“Forum forum pertemuan secara spesifik tidak ada, tapi setiap forum pertemuan dan acara kemasyarakatan passti kita sampaikan tidak harus menspesifikan acaranya pasti kita sampaikan masyarakat bagaimana cara membakar, apapun pertemuannya. Disampaikan selalu, karena efeknya akan sangat penting. Termasuk dalam sanksi sanksinya yang akan di pidanakan, jadi masyarakat pun akan takut dan tidak mengulangi kembali. Sembari memberikan contoh contoh penangkapan.”

Masyarakat peduli api menyampaikan informasi kepada warga yang tinggal di desanya melalui pertemuan tatap muka secara langsung. Hal ini dilakukan karena dengan komunikasi tatap muka akan lebih efektif dalam menyadarkan masyarakat. Namun demikian, penggunaan media komunikasi lain sebagai saluran informasi terkait kebencanaan tetap dipakai. Temuan ini

mengemuka dalam focus grup discussion yang dilakukan bersama warga masyarakat: “Spanduk, untuk kawasan kampung kami ini ada “Hindari Kebakaran”, “Jangan Membakar”, “Sanksi Membakar”, sudah banyak spanduk spanduknya yang dipasang dari pintu masuk sampai kepintu keluar, itu setiap simpang ada spanduk. Pamflet, yang dibikin oleh perangkat desa juga disebarakan ke karang taruna di semua kampung juga. Jadi semua dari perangkat desa spanduk, pamfletnya dan memberikan himbauan lagi kepada masyarakat di kedai – kedai. Jadi banyak dan masiv sosialisasinya. Kalau masyarakat kami sekarang dijamin media ini ada grup seperti WA, dan IG, jadi apapun himbauan atau informasi dari lintas kampung atau kabupaten selalu ada dan disave oleh kami. Jadi kami yang meneruskan. WA grup Pemuda Kampung Sungai Kariwara. Ada juga seperti pemuda kreatif yang membuat ig, memasang spanduk sendiri tentang asap, kemudian di share atas nama kampung gitu kan. FB Kampung Sungai Kariwara. Mayoritas dan efektif di FB.”

Media komunikasi berbasis digital sudah bukan merupakan hal yang asing kehidupan masyarakat. Pemanfaatan Instagram, WA group, dan juga Facebook dipandang sebagai medium yang cepat untuk menyebarluaskan informasi. Temuan

penggunaan media digital yang dipakai sebagaimana temuan data wawancara BPBD Propinsi Riau dan FGD masyarakat senada dengan yang disampaikan oleh Saiful, Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Siak.

Kalau kami melakukan komunikasinya ada yang formal dan informal seperti WA Grup. Di grup itu cukup efektif karena ada Bupati, Camat dan semuanya ada di situ kita dapat informasi Hotspot dari laporan dari BPBD. Kalau sudah ada informasi kita sebagai Humas memberikan himbauan berupa release berita keadaan bagaimana dan kita komunikasikan apa yang diperlukan kepada perusahaan. Nanti kita komunikasikan dengan perusahaan. Grup ini efektif karena di satu grup itu sebagai komunikasi internal kita. Lalu komunikasi kepada masyarakat kita melalui himbauan release berita, medsos Facebook Humas Protokol Siak, IG @HumassProtokolSial. Hibauannya sampai saat ini untuk tidak keluar dari rumah atau keluar ruangan belum sampai harus mengungsi. Sosialisasi juga berdasarkan unsur pimpinan, edukasi atas dampak asap yang langsung kepada masyarakat. Serta media sosialisasi dengan brosur, leaflet, dan menyertakan tokoh tokoh masyarakat sebagai pembicara dan mengajak untuk kesadaran. Materi edukasi

itu memang ada yang disalurkan dari Kabupaten, Provinsi. Daerah daerah rawan yang berpotensi akan kita survey terlebih dahulu dana akan kita berikan sosialisasi terlebih dulu. Kalau kecamatannya 18 kecamatan. Sungai apit, Siak, Usako, Sungai Mmandau, Bungaraya, Potogasip, Kandis, Bekura. Ada lahan masyarakat ada juga lahan perusahaan.

Disamping melalui media digital Pemerintah Kabupaten Siak mengkombinasi dengan komunikasi kepada para pemuka masrakat. Hal ini dilakukan untuk membantu memberikan penjelasan himbauan yang bersifat persuasive. "Peran tokoh masyarakat diiap tiap kesempatan, tiap jumat, dititipkan peringatan ke masyarakat, kemudian di pengajian – pengajian, jadi lebih kepada forum – forum masyarakat. PKK, Posyandu, dan semua lini yang dinilai cukup efektif agar masyarakat sadar atas kebakaran."

Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan aktifitas komunikasi tentang kebencanaan dilaksanakan oleh Humas dan Protokol yang bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penggunaan media komunikasi online telah dimanfaatkan. Mengacu pada pendapat Indrajit (2006) pemerintah Propinsi Riau dan Kabupaten Siak melaksanakan publikasi informasi melalui media internet. Hal ini

dilakukan untuk menyampaikan informasi secara cepat. Namun demikian yang perlu diperhatikan adalah adanya kemungkinan informasi yang tidak benar (hoax) / fake news yang beredar di media online terkait dengan bencana yang terjadi.

Tugas dan fungsi humas pemerintah dalam komunikasi bencana dilakukan secara lintas sectoral. Tidak selalu dilaksanakan oleh biro humas dan protocol pemerintah. Kedua lembaga pemerintah tersebut sebagai garda depan penyebarluasan informasi terkait bencana kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau. Dengan demikian, mengacu pada Nilasari (2012) humas pemerintah menjalankan kegiatannya dalam rangka menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan setiap stakeholder terkait persoalan bencana kebakaran hutan dan lahan. Upaya yang dilakukan tidak semata-mata melalui media internet namun tetap mengkombinasi dengan pertemuan-pertemuan tatap muka kepada tokoh masyarakat yang jadi sumber rujukan masyarakat pada level bawah.

Penutup

Melalui pembahasan yang dilakukan maka dapat diperoleh gambaran ringkas bahwa pelaksanaan E-Government

Humas Di Propinsi Riau dalam menangani persoalan bencana telah dilaksanakan. Namun untuk mencapai efektifitas yang tinggi pemerintah masih melaksanakan kegiatan komunikasi bencana tersebut melalui komunikasi tatap muka dengan warga. Cara lain yang ditempuh dengan melibatkan warga masyarakat dalam wadah komunitas terkait dengan bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Asteria, Donna. 2016. Optimalisasi Komunikasi Bencana Di Media Massa Sebagai Pendukung Manajemen Bencana. *Jurnal Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*. Vol.1. No.01.
- Andriariza AS, Yan. 2013. Analisis Penerapan E-Government Di Kabupaten Sragen. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika* Vol. 3 No. 1 September.
- Budi HH, Setio (ed), 2011, *Komunikasi Bencana*, Penerbit : ASPIKOM, PERHUMAS Yogyakarta dan Buku Litera.
- Cresswell, J.W. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*

- and Mixed*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Coppola, Damon, Maloney, Erin K, 2009. *Emergency Preparedness Strategies for Creating a Disaster Resilient Public*. Taylor and Francis Group, LLC.
- Daymon, Christine & Immy Holloway. 2008. *Metode – Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communication (terj)*. Yogyakarta: Bentang
- Haddow, G. D, dan Kims. 2008. *Disaster Communications, In A Changing Media World*. London. Elsevier
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government “Strategi Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital”*. Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong, 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya.
- Maya, Fahdia & Noviyanto, Fiftin. 2013. Pemanfaatan Google Maps API Untuk Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Bantuan Logistik Pasca Bencana Alam Berbasis Mobile Web (Studi Kasus: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta), *Jurnal Sarjana Teknik Informatika, E-ISSN: 2338-5197. Volume 1, Nomor 1*.
- Nilasari, Betty Wahyu. 2012. *Humas Pemerintah*. Jakarta: Graha Ilmu
- Nurjanah, Adhianty & Nurnisya, Frizki. 2016. Pemanfaatan Digital Public Relation (PR) Dalam Sosialisasi Tagline “jogja istimewa” Humas Pemerintah Kota Yogyakarta. *Jurnal Aristo. ISSN 2338-5126. Vol. 4. No.1*.
- Raharwindy Kharisma Sudrajat, Endah Setyowati, Sukanto. 2014. Efektivitas Penyelenggaraan E-Government Pada Badan Perizinan Terpadu Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 12
- Sutopo, H.B, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.